

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi karena kondisi ini diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) mulai tahun 1990 (Todaro 2000). IPM merupakan indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan tingkat kemajuan hidup manusia melalui faktor-faktor seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pemerintah dituntut berperan penting, strategis dan utama dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan fiskal merupakan instrumen pokok yang mengantarkan pemerintah menjalankan perannya dalam perekonomian negara. Program pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang masyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *trickle down effect*.



Pulau Sulawesi merupakan salah satu bagian dari wilayah Republik Indonesia yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, seperti kekayaan laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan namun masih ada beberapa provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih dalam kategori sedang. Pemerintah daerah telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut.

Sasaran pembangunan, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengukuran IPM belum menunjukkan hasil yang optimal pada beberapa provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi. Publikasi BPS (2023), menunjukkan pencapaian IPM di empat provinsi di Pulau Sulawesi sudah termasuk dalam kategori *high human development*, yaitu provinsi Sulawesi Utara (73,81), Provinsi Sulawesi Tengah (70,28), Provinsi Sulawesi Selatan (72,82) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (72,23). Sedangkan Provinsi Gorontalo (69,81) dan Provinsi Sulawesi Barat (66,92) masih termasuk kategori *medium human development*.

Rendahnya pencapaian kesejahteraan masyarakat pada dua provinsi di Pulau Sulawesi ini, disebabkan karena rendahnya kinerja pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan daerah. Hal ini karena masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan pada setiap daerah. Jika dibandingkan dengan IPM Indonesia yang mencapai 72,91 persen pada tahun 2022, mengindikasikan program pembangunan di daerah tersebut kurang mampu berperan sebagai faktor pendorong pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia dalam konsep IPM, setara dengan pembangunan ekonomi yang keduanya menjadi parameter dalam menilai pembangunan suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan konsep *human capital* di mana dalam pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada aspek *human capital*. Dalam pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous economic growth*), sumber daya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi dan kelembagaan, merupakan hal paling utama dalam model tersebut (Romer 1994).



Indeks pembangunan manusia menurut provinsi di Pulau Sulawesi ini peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi terus mengalami kemajuan selama tiga belas tahun terakhir bahkan provinsi dengan IPM melebihi IPM nasional seperti Provinsi Sulawesi Utara.

Terlihat bahwa tahun 2018 sebesar 72,20 persen, tahun 2019 sebesar 72,99 persen, tahun 2020 sebesar 72,93 persen, tahun 2021 sebesar 73,30 persen dan tahun 2022 sebesar 73,81 persen. Sedangkan IPM Indonesia tahun 2018 sebesar 71,39 persen, tahun 2019 sebesar 71,92 persen, tahun 2020 sebesar 71,94 persen, tahun 2021 sebesar 72,29 persen dan tahun 2022 sebesar 72,91 persen (BPS, 2023).

IPM Sulawesi Barat yang paling rendah diantara ke enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, namun tetap tumbuh sebesar 0,95 persen per tahun. Pada periode 2021-2022, IPM Sulawesi Barat tumbuh 0,84 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2020-2021, yang tumbuh 0,38 persen. Meskipun selama periode 2018 hingga 2022 IPM Sulawesi Barat menunjukkan kemajuan yang besar, namun status pembangunan manusia Sulawesi Barat masih belum berubah. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo masih berstatus “sedang” karena masih berada pada kisaran nilai $60 \leq \text{IPM} < 70$.

Pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tersebut bisa melaju dengan cepat, tetapi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya masih memerlukan perbaikan. Masyarakat di wilayah tersebut mendambakan *standard of living* atau standar hidup yang lebih tinggi. Menurut Dornbusch, R., Fischer, S., dan Startz (2011), standar hidup mengacu pada kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu bergantung pada konsumsi barang dan jasa seumur hidup. Menurut Van Den Berg (2002), proksi alternatif populer kesejahteraan yang sesuai untuk digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih

sehat, lebih berpendidikan dan terjadi penurunan kriminalitas. Karena pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan perubahan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu



kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah.

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2018-2022. PDRB perkapita empat provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo mengalami kenaikan terus menerus selama beberapa tahun terakhir. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk, rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahun. Berbeda dengan capaian PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mengalami fluktuasi. Namun pasca pandemi Covid-19 terus tumbuh positif seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. PDRB per kapita Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp 65,59 juta dan Sulawesi Barat mencapai Rp 37,07 juta masih lebih rendah dari nasional sebesar Rp71,03 juta (BPS, 2023).

PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk secara riil yang dinyatakan dalam persen. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi di Wilayah Sulawesi selama periode 2018-2022 rata-rata mengalami fluktuasi. Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan tertinggi pada laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 15,17 persen, kemudian diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan sebesar 5,53 persen dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara dengan laju pertumbuhan masing-masing 5,42 persen dan 4,04 persen. Pertumbuhan selama tahun 2018-2022 adalah provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,30 da tahun 2022.



ah satu upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara akukan dengan meningkatkan pembentukan modal. Pembentukan modal

dapat juga bermula dari tabungan sehingga pembentukan modal hadir sebagai pengumpul asset atau peningkat kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang (Ugochukwu dan Chinyere, 2013)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seringkali dikenal sebagai investasi fisik. Dalam pertumbuhan ekonomi, investasi memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengetahui kontribusi PMTB serta perubahan inventori terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dicari keterkaitan antara besaran PMTB dan persediaan dengan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun demikian untuk mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan yang merupakan proses akumulasi tersebut tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu negara/wilayah dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan inventori terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana sebagian dari investasi dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi.

Perkembangan tren PMTB setiap provinsi di Pulau Sulawesi terus meningkat dari tahun 2010-2022 hal ini sejalan dengan PDB Indonesia yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Dikutip dari BPS, PMTB merupakan komponen PDRB dari sisi pengeluaran dan mempunyai andil bagi penyusunan kebijakan pemerintah maupun untuk kepentingan para pelaku bisnis. Provinsi dengan tingkat rata rata PMTB 2010-2022 tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara dan provinsi dengan tingkat rata rata PMTB terendah adalah Provinsi Gorontalo dan provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan angka penjualan pada beberapa sektor cenderung rendah sehingga para penanam modal swasta ragu akan menanamkan modalnya. Praktis hanya investasi fisik pemerintah proyek-proyek konstruksi seperti jalan, listrik, dan air yang mendominasi.

Kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran belanja langsung termasuk belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja lainnya.



Belanja pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, dan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan pendidikan dan perlindungan sosial. Belanja pemerintah yang ditunjukkan

pada fungsi tertentu dapat menciptakan multiplier ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat.

Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang penting untuk menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Menurut World Bank (2016) sebagaimana mengutip Rangongo dan Ngwakwe (2019), pendidikan merupakan investasi dalam menumbuhkan ekonomi karena memberdayakan SDA dengan berbagai keterampilan guna menumbuhkan ide-ide baru untuk produk, layanan, dan teknologi baru, tetapi ini membutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua negara di dunia. Tetapi pendidikan tidak hanya berjalan sendiri, perlu juga kesehatan dalam rangka mencapai SDM yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut karena pendidikan dan pengetahuan saja tidak cukup, harus ditunjang dengan fisik yang sehat agar dapat produktif dan nantinya dapat menggunakan kemampuan dengan maksimal. Kemampuan kognitif bukanlah satu-satunya dimensi dari sumber daya manusia yang diperhitungkan, kesehatan juga penting: orang yang lebih sehat cenderung lebih produktif (World Bank, 2018). Pemerintah dapat melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Menurut Tyndorf, D., dan Glass (2017), kombinasi penciptaan human capital melalui perguruan tinggi dan universitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pada bagian kesehatan, berdasarkan bukti penelitian Strauss, J., & Thomas (1998), modal kesehatan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin sehat seseorang dapat membuat orang tersebut bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga bisa mendorong perekonomian tumbuh.

Pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup sejahtera, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis



tan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Dengan demikian nya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup

sejahtera yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan pada umumnya mengalami kenaikan, namun besarnya masih dibawah pengeluaran pemerintah pada sektor industri, perumahan dan pemukiman, serta sektor ekonomi lainnya. Jelas ini mesdeskripsikan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh antara lain Fan, at.al., (2000), Gomanee, at.al.,(2005) dan Chemingui (2007). Barro dan Sala-i-Martin (2004) memperkenalkan model endogenous yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi di dorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik serta pengembangan teknologi untuk mencapai derajat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Menurut Mankiw (2007) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia, yaitu terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Perbaikan pendidikan dan kesehatan SDM diharapkan bisa memperluas kesempatan untuk mencapai hidup yang layak. Modal manusia yang mengacu pada perbaikan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Pembangunan sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan/keahlian, meningkatkan harkat, martabat setiap individu. Pendidikan sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan return dimasa apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin



adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia.

Pemanfaatan alokasi anggaran sektor pendidikan yang memadai terutama untuk sub sektor pendidikan primer dan menengah, dan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan terutama bagi kaum miskin di kota dan penduduk pedesaan akan memperbaiki keefektifan sub-sektor tersebut dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Perkembangan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Peningkatan anggaran terjadi dari tahun 2018 sebesar Rp.12.386.915 juta naik menjadi Rp.13.111.942 juta pada tahun 2019 namun tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.12.959.037 juta dan Rp. 10.723.760 juta. Kenaikan anggaran terjadi pada tahun 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp.12.548.450 juta.

Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar dari enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi sedangkan yang terkecil adalah belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain belanja pemerintah, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance* diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Jika dikaitkan dengan perubahan terhadap pembangunan masyarakat, apabila *good governance*



tidak terlaksana seperti yang seharusnya, maka akan menimbulkan reaksi resistensi atau penolakan dari masyarakat. Akan ada banyak kecurigaan lakpasan bila pembangunan tersebut menggerus hak-hak asasi cat. Perubahan terhadap sesuatu yang sudah mendiami masyarakat akan

menimbulkan penolakan dari masyarakat untuk melindungi nilai-nilai yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat agar keadilan dan kesejahteraan tidak hilang karena pembangunan.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan yang didukung oleh pertumbuhan rakyat diperlukan suatu pemerintahan yang bersih (*good governance*) di mana pelaku politik tidak ikut bermain dalam bidang ekonomi sehingga tidak ada peluang KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena hanya *good governance* yang dapat mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Indikator lainnya dari pembangunan ekonomi suatu negara diantaranya adalah perubahan struktur ekonomi dan perubahan struktur penggunaan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi atau susunan sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian perubahan ini diikuti pula oleh perubahan proporsi penggunaan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang disertai perbaikan distribusi pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi. Peran sektor primer umumnya berkurang pada masa peralihan sistem perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Peralihan ini dikenal sebagai fenomena transformasi struktural. Pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan transformasi struktural dimana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain (Mecik, 2014).

Kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju ke sektor sekunder hingga ke sektor tersier. Pengurangan peran ditandai dengan beralihnya tenaga kerja dan investasi dari sektor primer menuju ke sektor sekunder atau tersier.



Perubahan peran pada sektor primer merupakan salah satu metode dalam pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Tenaga kerja dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan

struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi (Szirmai A, Wim N 2012).

Perubahan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan *increasing returns to scale* (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1998). Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa. Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor (X - M), Agregat supply (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran Chenery pada dasarnya sama dengan teori model Lewis. Teori Chenery dikenal dengan teori *pattern of development*, dimana dalam teori ini difokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Chenery, 1979).

Proses pertumbuhan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya pangsa primer (pertanian), meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000)



Struktur ekonomi pada enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi selama lima tahun terakhir 2018-2022 relatif tidak banyak mengalami pergeseran, masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam (SDA), terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selama tahun 2018-2022, sektor yang berbasis sumber daya alam (SDA) seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 6 Provinsi di Pulau Sulawesi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Struktur perekonomian Wilayah Sulawesi terbesar disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor konstruksi. Keenam sektor tersebut berkontribusi sekitar 69,52 persen pada tahun 2019. Hal yang sama untuk perekonomian provinsi di Wilayah Sulawesi terbesar dari sektor pertambangan berkontribusi paling besar di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi basis di seluruh provinsi terbesar di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat; sektor perdagangan terbesar di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, dan sektor industri pengolahan terbesar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Uraian mengenai variabel-variabel seperti kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah untuk perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan dan struktur ekonomi, memberikan gambaran bahwa hubungan antara variabel tersebut mempunyai arti yang penting untuk dianalisis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait "Belanja Pemerintah, Tata Kelola Pemerintahan, Struktur Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2022".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yang didasari dari uraian latar belakang sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?



2. Apakah belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
3. Apakah belanja pemerintah lainnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
4. Apakah tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
5. Apakah struktur ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sebuah konsep baru dan model penelitian empiric untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja lainnya terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
4. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PMTB dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat yang didasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan.

- a. Manfaat Teoritis: yakni memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoritis keilmuan yakni pemahaman secara makro keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat, PMTB, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, belanja pemerintah lainnya, tata kelola pemerintahan dan struktur ekonomi.
- b. Manfaat Praktis:
 1. Diharapkan memberikan kontribusi pengembangan ilmu ekonomi, terutama kesejahteraan masyarakat.
 2. Diharapkan sebagai dasar atau informasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
 3. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengadopsi kebijakan belanja pemerintah yang lebih responsif terhadap kesejahteraan rakyat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

Tinjauan teori ini akan menjelaskan teori yang melandasi dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kesejahteraan masyarakat, PMTB, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, tata kelola pemerintahan dan struktur ekonomi pada enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.

2.1.1. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Welfare state adalah *grand theory* kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Bentham dan menjelaskan bahwa tugas negara adalah memastikan *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*. "Happiness" yang dimaksud mengacu pada kesejahteraan sebagai utilitas. Bentham mengemukakan bahwa aksi pemerintah dalam pengembangan kebijakan sosial wajib diarahkan untuk memberikan kesejahteraan bagi orang banyak (Riwanto, 2018).

Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya mengadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Ada kecenderungan individu akan selalu berusaha untuk memuaskan keinginan tersebut. Maka kesejahteraan itu dicapai pada saat kepuasan itu bisa tercapai secara optimum. Pencapaian tingkat kepuasan inilah yang menjadi kajian ilmu ekonomi. Berbagai pendekatan bisa menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga bisa dikatakan "sejahtera" atau "puas". Diantaranya adalah pendekatan marginality, utility, efisiensi pasar, dan opportunity cost (Case, 2003).

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert et al. 2018). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi

adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, dan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya an prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neoclassical welfare*



theory merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip Pareto Optimality. Prinsip *Pareto Optimality* menyatakan bahwa *the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off* Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain prinsip *pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dalam paradigma pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: a) Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan perumahan, kesehatan dan perlindungan. b) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. c) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Pigou diakui sebagai penggagas ekonomi kesejahteraan. Dia pertama kali menguraikan konsep kesejahteraan dan berhasil meletakkan dasar teori kesejahteraan tradisional (Roosma, at.al., 2014). Kesejahteraan menggambarkan evaluasi orang terhadap kehidupan mereka, termasuk kebahagiaan, emosi yang menyenangkan, kepuasan hidup, dan relatif tidak adanya suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan (Stutzer dan Frey, 2002), konstruk kesejahteraan subjektif sering disebut sebagai kebahagiaan atau kepuasan hidup. Ekonom sering menganggap kesejahteraan sebagai istilah ilmiah untuk kepuasan hidup dan kebahagiaan.

Teori kesejahteraan tradisional dapat dibagi menjadi dua jenis: teori kesejahteraan objektivis dan teori kesejahteraan subjektivis. Teori kesejahteraan objektivis mendefinisikan dan menghitung kesejahteraan) dari perspektif ran konsumen aktual (Heffetz 2012), substansi dasar yang dibutuhkan ap orang yang rasional (Fisher, 2000), dan kuantitas sumber daya yang leh seorang individu. Teori kesejahteraan objektivis terutama berfokus menghitung kuantitas dan kualitas kesejahteraan tanpa



mempertimbangkan dampak kondisi psikologis terhadap kesejahteraan total. Dengan demikian, profil perubahan kesejahteraan yang lengkap sulit dicapai dengan menggunakan pendekatan ini. Misalnya, sulit untuk mengukur variabel-variabel penting yang berdampak nyata pada kesejahteraan seperti perubahan lingkungan dan perubahan status pekerjaan petani melalui perubahan pendapatan.

Sebaliknya, teori kesejahteraan subjektif berpendapat bahwa esensi kesejahteraan adalah utilitas, dipandang sebagai representasi preferensi atas beberapa barang dan jasa. Karena ini merupakan proses evaluasi subyektif, penggunaan utilitas untuk mengukur perubahan kesejahteraan petani akibat permintaan tanah akan mendistorsi atau membesar-besarkan hilangnya kesejahteraan yang sebenarnya (Nelson, 1992).

Teori utilitas ordinal mengakui bahwa utilitas individu yang berbeda tidak dapat dibandingkan, karena utilitas tidak dapat diukur atau diamati secara langsung (Bell, 1987). Oleh karena itu, teori kesejahteraan subjektif memerlukan monisme utilitarian yang mengabaikan pluralisme, yang merupakan karakteristik penting dari kesejahteraan. Secara lebih umum, dua cacat terlihat jelas dalam teori kesejahteraan tradisional. Yang pertama adalah statis dan bias untuk mengukur status kesejahteraan saat ini dan kurang mampu menangkap potensi kesejahteraan. Kedua, landasan teori kesejahteraan tradisional didasarkan pada perubahan kesejahteraan individu, sehingga sulit untuk melihat kesenjangan kesejahteraan secara kolektif.

Todaro and Smith (2015) mengemukakan bahwa peningkatan pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas), seperti tuan tanah, politisi, pimpinan perusahaan, dan kaum elit lainnya akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang-barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal, berpergian ke luar negeri, dan atau menyimpan kekayaannya di luar negeri dalam bentuk pelarian modal (*capital flight*). Sementara golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Peningkatan pendapatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan



dan seluruh perekonomian. Kesejahteraan masyarakat menengah ke atas dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup yang rendah ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat

produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Selama beberapa dekade, pendekatan yang dominan terhadap isu mengenai kesejahteraan datang dari ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pengukuran kesejahteraan dilakukan dengan menggunakan ukuran yang bersifat proxy, terutama uang atau sumber daya material. Suatu definisi singkat tentang kesejahteraan dari perspektif ini adalah ketersediaan sumber-sumberdaya dan keberadaan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk suatu kehidupan yang nyaman, sehat dan aman. Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi secara umum adalah *economic well-being*. *Economic wellbeing* mengacu pada sumber daya material yang tersedia bagi suatu rumah tangga (Smeeding, 2005). Analisis kesejahteraan dari aspek uang dan materi menunjuk pada kesejahteraan obyektif.

Dalam teori ekonomi, konsep kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai ekonomi kesejahteraan (Welfare Economics) yang pada hakikatnya menjelaskan tentang alokasi faktor-faktor produksiserta barang dan jasa dalam suatu perekonomian kepada semua warga masyarakat. Ekonomi kesejahteraan adalah berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: a). Bagaimana faktor-faktor produksi dialokasikan kepada produk-produk barang dan jasa? b). Bagaimana produk-produk barang dan jasa tersebut didistribusikan kepada masyarakat? c)..Konsep yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya adalah berdasarkan teori Pareto Efficient serta Pareto Optimum. d). Dalam teori Pareto Efficient ini, tidak menjelaskan tentang pemerataan distribusi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Pareto Berdasarkan hal tersebut ukuran kesejahteraan masyarakat yang dipergunakan sebagai capaian hasil pembangunan dalam studi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertimbangan, indeks ini merupakan indeks komposit dari beberapa indeks yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan soaial.

2.1.2 Tinjauan Teoritis Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)



MTB merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB menurut ran. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk barang modal dengan umur

pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Cakupan PMTB meliputi : bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik. Pembentukan modal menjadi salah satu determinan yang penting bagi peningkatan perekonomian sebuah negara (Sunny dan Osuagwo, 2016).

Terdapat keterkaitan antara pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pembentukan modal meningkatkan stok barang-barang modal sebagai pendukung kegiatan produksi secara eksplisit (Jhingan,2003:377). Dengan meningkatnya pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara maka akan meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan baru sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan pihak swasta akan tenaga kerja karena kesanggupan dalam memproduksi barang juga meningkat yang berimbas pada kenaikan pendapatan perkapita yang akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal tetap bruto mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Barang modal yang dibeli atau dibuat sendiri adalah barang tahan lama yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya berusia pakai satu tahun lebih. Pembentukan modal tetap domestik bruto dibedakan atas:

- a. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi; nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai seluruh keluaran (output) sektor konstruksi yaitu nilai bahan bangunan/konstruksi ditambah ongkos angkut dan margin perdagangan serta biaya lain berupa jasa serta biaya primer. Nilai keluaran sektor bangunan yang berasal dari perbaikan-perbaikan ringan/kecil tidak dihitung sebagai pembentukan modal.
- b. Pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri (Jhingan, 2016).



injauan Teoritis Pertumbuhan Ekonomi

Jhingan (2016), membedakan pengertian ekonomi pertumbuhan dengan pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari

kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan nyata per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan disertai berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi (Jhingan, 2016). Definisi ini memiliki tiga komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan, kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Keberhasilan program-program pembangunan sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional, bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan (Jhingan 2016).



suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai dimasa sebelumnya. Perubahan dan perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Komponen

utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara menurut Todaro (2011) yaitu : 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; 2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja; dan 3) Kemajuan teknologi, yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan teknologi yang bersifat netral; (b) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja; (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.

Menurut (Todaro, 2011), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil, sedangkan pembangunan ekonomi menunjukkan struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikemukakan oleh Evesy D. Domar dan Roy F. Harrod Harrod telah mengemukakan teorinya pada tahun 1939 dalam sebuah jurnal (*Economic Journal*), sedangkan Domar mengemukakan teorinya pada tahun 1947 dalam sebuah jurnal (*American Economic Review*). Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, akan tetapi inti dari kedua teori tersebut sama, maka dikenal dengan sebutan teori Harrod-Domar. Sebelumnya teori sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh Jhon Maynard Keynes yang kemudian diperluas dan dikembangkan oleh Harrod Domar mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan tenaga kerja. Menurutnya, analisis Jhon Maynard Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak menyinggung masalah-masalah ekonomi yang sifatnya jangka panjang. Dengan kata lain, teori Harrod-Domar muncul dengan menunjukkan syarat agar



perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap.

asumsi-asumsi yang dimiliki oleh teori ini, yaitu (a), perekonomian dalam keadaan pengangguran penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam perekonomian digunakan secara penuh; (b), perekonomian terdiri dari dua sektor,

yakni sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada; (c), besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan; (d) kecenderungan untuk menabung.

Model pertumbuhan ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan secara positif berhubungan dengan pendapatan. Yang berarti semakin tinggi rasio pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan yang terjadi, atau sebaliknya.

Schumpeter (1883-1950) dianggap sebagai ekonom yang melahirkan konsep pertumbuhan ekonomi yang memadukan analisis aliran klasik dengan pemikiran-pemikiran moderen dalam teorinya. Optimisme terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang merupakan ciri utama teori Schumpeter yang membedakan dengan teori-teori klasik lainnya.

Schumpeter meyakini bahwa dalam jangka panjang, tingkat hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh negara tersebut. Perbedaan lainnya dari teori Schumpeter dari teori klasik yakni tidak adanya penekanan terhadap aspek pertumbuhan jumlah penduduk dan keterbatasan sumber daya alam.

Pemikiran Schumpeter adalah peran teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana motor penggeraknya adalah proses yang dinamakan inovasi, kemajuan ekonomi masyarakat hanya bisa diterangkan oleh inovasi oleh para inovatornya. Diantara berbagai bentuk inovasi, perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi yang besumber dari kreativitas penemunya. Walaupun demikian perlu disadari bahwa inovasi tidak mengalir secara merata sepanjang waktu tetapi lebih bersifat menggumpal dan apabila timbul inovasi seperti ini, maka akan terjadi investasi yang besar yang akan meningkatkan seluruh kegiatan ekonomi.

Teori pertumbuhan Arthur Lewis (1954) membahas proses industrialisasi pada tahap awal pembangunan kapitalis di Eropa dengan melihat hubungan antara sektor pertanian (tradisional) dengan industri (moderen) dalam perekonomian yang terjadi antara daerah perekonomian pedesaan dan perkotaan

memasukkan proses urbanisasi yang terjadi didaerah tersebut.

Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori Teori ini dikembangkan berdasar hipotesis Clark-Fisher yang mengatakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh



penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder), kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (sector shift). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah.

2.1.4. Tinjauan Teoritis Belanja Pemerintah

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), ditetapkan bahwa Pemerintah minimal mengalokasikan 20persen dari APBN maupun APBD yang digunakan untuk kebutuhan di bidang pendidikan. Untuk sektor kesehatan, investasi pemerintah dilaksanakan dengan pengadaan prasarana dan sarana kesehatan, atau program pemerintah yang berkaitan langsung terhadap pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan akan berimbas pada naiknya tingkat produktivitas yang akan dinikmati masyarakat yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin dan berpendidikan rendah (Anand and Ravallion, 1993)

Beberapa pendapat tentang pengeluaran pemerintah, pertama menurut Rostow dan Musgrave, teori mereka ini menghubungkan biaya pemerintah pada tahap pembangunan ekonomi pada tahap awal perkembangan ekonomi. Menurut mereka rasio-rasio pengeluaran pemerintah relatif besar terhadap pendapatan nasional. Menurut Musgrave, selama proses pembangunan rasio total investasi proporsi pendapatan nasional meningkat, tetapi proporsi pendapatan nasional menurun. Rostow berfikir pada tahap perkembangan selanjutnya, kegiatan pemerintah berubah dari penyediaan menjadi 33 layanan, pengeluaran untuk layanan sosial seperti infrastruktur ekonomi kesehatan dan pendidikan (Haniko, Engka, and Rorong 2022).

Teori *citizen-over-state* telah digunakan sejumlah besar penelitian untuk menjelaskan berbagai aktivitas pemerintah, termasuk belanja pemerintah. Digunakan dalam domain belanja pemerintah, teori citizenover-state telah mengambil beragam penekanan. Sebagian studi berfokus kepada PDB per kapita ukuran makro terhadap tingkat kesejahteraan rakyat, studi lainnya kepada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebagai kesejahteraan ekonomi, sedangkan yang lainnya berfokus kepada



kesejahteraan kemanusiaan (Kirchner, 2011; Bernauer dan Koubi, 2006). Studi belanja pemerintah yang berfokus kepada PDB per kapita antara lain Keynes (Bevir, 2007).

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi: 1) Periodik; 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran; 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; 4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Mangkoesebroto (2016) memberikan penjelasan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi cerminan kebijakan pemerintah di suatu wilayah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut dibiayai melalui anggaran pemerintah yang kemudian dikeluarkan melalui pengeluaran pemerintah. Teori Adolf Wagner menegaskan bahwa kegiatan pemerintah seiring waktu akan meningkat juga didukung oleh pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi. Menurut Wagner semakin meningkatnya pendapatan masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan terus meningkat seiring waktu. Karena pemerintah harus mengatur kestabilan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, hukum, budaya, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah disebabkan oleh meningkatnya fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan, fungsi pembangunan, dan fungsi pertahanan. Hukum Wagner juga populer dengan *The Law of Expending Statue Expenditure*.

Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa ada hubungan antara pembangunan dengan pengeluaran pemerintah, hal ini didasarkan dengan menghubungkan anatara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi tiga tahap yakni: tahap awal, menengah dan tahap lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi Rostow dan Musgrave jumlah pengeluaran pemerintah terhadap PDB nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus melakukan investasi agar dapat menunjang sarana dan



prasarana seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan agar semakin meningkat. Pada tahap ini investasi pemerintah berkembang dengan investasi swasta yang juga semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahap lanjutan menurut Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah beralih fungsi dari penyedia sarana prasana kegiatan ekonomi menjadi pengeluaran untuk layanan masyarakat seperti program hari tua, program pendidikan, program kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori Rostow dan Musgrave muncul berdasarkan pengamatan atas pengalaman pembangunan yang sudah dialami oleh banyak negara namun tidak didasari oleh teori tertentu.

Menurut Lubis (2013) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan melalui indeks pembangunan manusia. Saat ini prioritas utama pembangunan nasional masih bertumpu pada pembangunan fisik, mengalahkan bidang pendidikan yang memiliki arti dan bersifat strategis dalam memperbaiki kehidupan negara ini.

Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah daerah berarti semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum (publik), tidak saja meliputi kegiatan pemerintah daerah saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah daerah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum (Dumairy, 1996), untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan peranannya sebagai pengalokasi, pendistribusi dan stabilisasi dari sumber penerimaannya.

Sebagai instrumen pembangunan, pendidikan membina dan meningkatkan keterampilan kerja. Keterampilan individu dapat mendorong ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas (Hannum dan Buchmann, 2005). Pendidikan juga memainkan peran besar dalam perkembangan ekonomi dan sosial di setiap negara karena pendidikan memberikan landasan untuk membangun. Artinya, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi sosial. Tidak ada negara yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa investasi dalam pendidikan (Sakmurzaeva, 2018). Pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada human capital suatu negara. Lebih lanjut, pembangunan



human capital suatu negara dapat diukur melalui seberapa jauh investasi di bidang pendidikan (Jorgenson dan Barbara, 1993). Menurut Malamud dan Zucchi (2019), kualitas *human capital* dapat memupuk inovasi yang merupakan kunci terciptanya teknologi baru untuk barang dan jasa, yang pada gilirannya diakui sebagai mesin pertumbuhan (Rangongo dan Ngwakwe 2019). Menyatakan ada beberapa alasan agar negara berinvestasi pada sektor pendidikan. Seseorang dengan keterbatasan atau tidak memiliki kemampuan (skill) dapat membuat orang tersebut menganggur atau bekerja dengan imbal hasil yang rendah. Hal ini dapat membuat seseorang sulit membesarkan anaknya dan ketika hal ini terus berulang dapat membuat rantai dan siklus kemiskinan yang tidak terputus. Pengaruh sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan kerangka *endogenous growth theory*. Romer, (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari hasil endogen dari sistem ekonomi, bukan hanya dari hasil eksogen saja. Teori pertumbuhan eksogen seperti yang dikembangkan oleh Solow-Swan atau Harrod-Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena faktor eksogen system ekonomi seperti perkembangan teknologi atau tingkat tabungan.

Hasil-hasil verifikasi empiris telah diajukan para peneliti dalam berbagai konteks mengenai hubungan antara belanja pemerintah dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Namun, bukti-bukti empiris di bidang tersebut masih inkonsisten. Misalnya, hasil-hasil studi empiris dari (Alam dan Sultana, 2010).

Thomas, Beegl, and Frankenberg (2000) menyatakan bahwa individu yang lebih sehat merangsang pertumbuhan dengan mempercepat transisi demografis untuk berinvestasi dalam pelatihan dan perolehan keterampilan yang lebih baik. Bentuk hubungan kesehatan produktivitas pada perekonomian telah dibangun dalam konteks jika produktivitas dan pendapatan berkorelasi positif dan jika kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas, maka akan mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi.

Kesehatan adalah sumber kesejahteraan manusia dan sarana membesarkan tingkat output. Kesehatan juga memiliki peran penting dalam itas tenaga kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lan Canning, 2008; Anand dan Ravallion, 1993; Hojman, 1996; serta dan Bidani 1994) sebagaimana dikutip dari Haile dan Nino-Zarazua menyatakan bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan memiliki



dampak yang signifikan pada status kesehatan seseorang. Secara singkat diartikan bahwa kontribusi kesehatan pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari belanja pada sektor kesehatan, semakin terbangun sektor kesehatan maka belanja pemerintah akan efektif dan efisien sehingga *health* status meningkat pada akhirnya ekonomi dapat meningkat.

Penelitian Iheoma (2014) menyatakan bahwa fokus mendasar dari pembangunan ekonomi adalah pengembangan pribadi manusia, dan selama bertahun-tahun, ada telah menjadi konsensus umum di kalangan ekonom pembangunan tentang keefektifan layanan sosial dalam mencapai tujuan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kesehatan masyarakat dan belanja pendidikan tersier sangat penting dalam menjelaskan perkembangan manusia di negara-negara ini. Belanja kesehatan serta pengeluaran pendidikan dasar dan menengah ternyata tidak signifikan. Dengan demikian, diharapkan agar memastikan kelanjutan pembangunan modal manusia dengan meningkatkan pendanaan publik untuk kesehatan sektor perlu.

Peran *human capital* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur mengenai pertumbuhan Baldacci, Guin Siu, dan De Mello (2003). Berdasarkan penelitian Ogundari and Awokuse (2018), *human capital* dan kesehatan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Sub-Saharan Afrika. Rangongo dan Ngwakwe (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi difasilitasi dari dalam sistem yang berproses secara inheren dalam sistem. Romer (1994) dalam karyanya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil endogen dari sistem ekonomi, bukan dari luar. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu anggaran dikatakan berkontribusi terhadap perekonomian, maka pemerintah bisa mencoba memaksimalkan sektor tersebut untuk menumbuhkan perekonomian. Ketika sebaliknya, perlu adanya evaluasi agar anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi perekonomian.

Peran *human capital* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibahas dalam literatur mengenai pertumbuhan Baldacci, Guin Siu, dan (2003). Berdasarkan penelitian Ogundari dan Awokuse (2018), *human* an kesehatan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi i Sub-Saharan Afrika.



Penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu anggaran dikatakan berkontribusi terhadap perekonomian, maka pemerintah mencoba memaksimalkan sektor tersebut untuk menumbuhkan perekonomian. Ketika sebaliknya, perlu adanya evaluasi agar anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi perekonomian.

Menurut (Baldacci, Guin-Siu, and Mello, 2003) kesehatan dan pencapaian pendidikan merupakan konsep multidimensi yang tidak dapat langsung diukur dengan satu set indikator. *Social outcome* harus dilihat sebagai hasil dari proses produksi yang kompleks yang melibatkan keterkaitan di antara banyak variabel, termasuk faktor kelembagaan dan perilaku individu. Dalam hal ini, alasan utama untuk memperkirakan status kesehatan dan pendidikan secara bersamaan adalah status kesehatan dapat berdampak pada kinerja di sekolah. Seperti misalnya, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan siswa sehingga berdampak negatif terhadap kinerja siswa di sekolah. Namun begitu pengeluaran terhadap sektor sosial saja tidak menjamin *social outcome* yang baik, terdapat unfavorable initial social condition seperti tingginya tingkat buta huruf atau kesenjangan dapat mempengaruhi social outcome

Todaro dan Smith (1993), menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan point penting dalam pembangunan perekonomian. Kesehatan dan pendidikan juga merupakan komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan dalam output agregat. Disisi lain, peran terkait modal manusia juga tidak terbatas pada pertumbuhan pendapatan agregat saja. Pendidikan menunjukkan hubungan dinamis yang kompleks dengan beberapa komponen kesejahteraan, termasuk kesehatan.

Siddique and Mohey-ud-din (2020) menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian. Studi tersebut juga merekomendasikan agar berfokus pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berpenghasilan rendah. Menurut Baldacci, Guin-Siu, (2003), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada status kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pada studi tersebut ditemukan bahwa belanja publik yang lebih besar untuk pendidikan dasar dan menengah berdampak positif pada ukuran pencapaian



pendidikan, dan peningkatan belanja perawatan kesehatan menurunkan angka kematian anak dan bayi. Jika alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan perawatan kesehatan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pembuat kebijakan di banyak negara berkembang dan transisi perlu lebih memperhatikan alokasi dalam sektor-sektor ini.

Menurut Rangongo dan Ngwakwe (2019), pemerintah memiliki peran untuk memacu momentum dalam mengejar pertumbuhan ekonomi; misalnya, kebijakan pemerintah tentang pengembangan human capital melalui investasi di bidang pendidikan telah terbukti menjadi strategi yang menonjol bagi pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara maju. Melalui penyertaan variabel yang tertanam dalam ekonomi (endogen), ahli teori endogen seperti Arrow, Romer dan Lucas mengedepankan fakta bahwa kebijakan pemerintah dapat berdampak positif atau negatif pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada pilihan pendekatan pertumbuhan yang dipilih pemerintah. Ini memiliki implikasi praktis bahwa pembangunan ekonomi di negara berkembang tidak dapat sepenuhnya dibiarkan berjalan dengan sendirinya, dimana dibutuhkan peran pemerintah di dalamnya. World Bank (2016) menyoroti bahwa pendidikan adalah investasi untuk pertumbuhan ekonomi karena memberdayakan penerima manfaat dengan berbagai keterampilan untuk menumbuhkan ide-ide baru untuk produk, layanan, dan teknologi baru, tetapi ini membutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua negara di dunia. Pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki manfaat tambahan tertentu selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menguntungkan individu yang menerimanya; seperti yang sudah dijelaskan, human capital adalah salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi.

Campur tangan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Secara proporsional dan efektif dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal melalui pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal membantu pertumbuhan ekonomi jika human capital dibentuk dalam proses pembangunan tur yang diperlukan untuk sekolah, pengembangan keterampilan dan tan kesehatan warga yang baik (Mekdad, Dahmani, dan Louaj, 2014). penelitian empiris tentang apakah ada hubungan kausal yang cukup antara pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan



terhadap kesejahteraan agregat masih terbatas dan diperdebatkan. Beberapa literatur menemukan bahwa pengeluaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan adalah prediktor yang lemah untuk peningkatan kesejahteraan (Flug, Splimbergo, dan Wachtenheim, 1998);(Filmer dan Pritchett, 1999); (Kim dan Moody, 1992), sedangkan studi lain berpendapat sebaliknya, dimana pengeluaran tersebut berdampak positif terhadap hasil kesejahteraan masyarakat (Ravallion dan Bidani Benu,1994); (Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui,2004). Studi yang lebih baru Rajkumar dan Swaroop (2008); Rodrik, Subramanian, dan Trebbi (2004) berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku di negara-negara dengan pemerintahan yang baik.

2.1.5. Tinjauan Teoritis Tentang Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan akan berjalan optimal apabila didukung dengan transparansi pada instansi pemerintah (Kristiansen,et al.,2009). Peran transparansi dalam penurunan tingkat korupsi pada sektor publik tidak dapat secara langsung menjadi hubungan sebab akibat (Kolstad dan Wiig, 2009). Transparansi hendaknya mempunyai kemampuan untuk diakses masyarakat, selain itu tidak semua informasi yang diungkapkan terkait dengan korupsi.

Pemerintah menjadi kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena lemahnya kualitas institusi berhubungan dengan beberapa masalah ekonomi, seperti investasi yang rendah, pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat, pendapatan per kapita yang lebih rendah, serta pertumbuhan output yang lebih lambat (Jude dan Levieuge, 2016).

Peningkatan informasi yang dapat diakses masyarakat menurunkan adanya asimetri informasi yang dapat menjadi salah satu penyebab korupsi (Elbahnasawy, 2014). Keunggulan *e-government* menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat korupsi yang telah banyak digunakan pemerintah saat ini (Bertot et al., 2010) serta dapat dijadikan sebagai strategi suatu negara untuk melibatkan masyarakatnya dalam melakukan pengawasan pada kinerja pemerintah (Klitgaard,1998). Pelaksanaan *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan



strategi Nasional Pengembangan E-government, yang menyatakan *e-government* merupakan salah satu strategi pemerintah yang dapat mendukung

tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tingkat akuntabilitas.

Pengertian profesionalisme adalah aparat pemerintah dengan kompetensi tertentu yang bertugas sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang berlaku. Pengembangan sumber daya manusia pada pemerintahan salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP No. 101 Tahun 2000. Tujuan diklat bagi aparat pemerintah adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesionalisme, daya inovasi, terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik serta terwujudnya keselarasan visi dalam menjalankan pemerintahan, menjunjung tinggi nilai dan norma serta meningkatkan integritas dalam memangku jabatan sehingga menunjang terciptanya GGG. Karakteristik tata kelola lainnya yang belum menjadi pertimbangan dalam penelitian sebelumnya adalah responsiveness yang didefinisikan bahwa pemerintah cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas yang dapat mendorong GGG adalah pelayanan yang baik, transparan dan cepat (Bappenas, 2007).

Effendi (2009) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sementara itu, permasalahan terkait korupsi membuat perekonomian menjadi terganggu karena pengalokasian anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur pembangunan manusia karena menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya yang diukur melalui besarnya pendapatan rata-rata penduduk di negara tersebut.

2.1.6. Tinjauan Teoritis Struktur Ekonomi

Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme perubahan struktur ekonomi negara yang sedang berkembang, dimana fokus produksi dalam ekonominya bersandar pada sektor pertanian atau bersifat subsisten. Fokus tersebut nantinya akan bertransformasi menuju sektor industri dan jasa orientasi perkotaan dan lebih modern (Todaro dan Smith, 2011).



Teori perubahan struktural membahas mekanisme transformasi ekonomi, yang semula lebih bersifat subsistens dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural). Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di perdesaan dan di perkotaan. Dalam teorinya, mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu perekonomian tradisional di perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama seperti di model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori *pattern of development*, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsistens) ke sektor industri sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Chenery menjelaskan teori perubahan struktural dengan menggunakan *teori Pattern of Development*. *Teori Pattern of Development* adalah analisis yang memfokuskan perubahan struktur dalam tahapan proses pertumbuhan ekonomi, industri, dan struktur institusi. Disamping itu, perkenomian negara sedang berkembang yang mengalami transformasi ekonomi dari pertanian tradisional menuju sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya (Sun'an, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Chenery ini menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari struktur produksi utama sektor pertanian menuju sektor industri. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut akan berkaitan erat dengan peningkatan akumulasi modal dan peningkatan sumber daya. Teori Chenery terkait dengan perubahan struktur menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi struktural yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, dimana keduanya saling berkaitan satu dan lainnya.



Lebih lanjut dikatakan bahwa ditinjau dari permintaan domestik akan berpengaruh terhadap penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan pangan. Terjadi akibat dari adanya peningkatan permintaan terhadap barang non-pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja

pemerintah, yang mengalami peningkatan dalam struktur Produk Nasional Bruto yang ada. Dilihat dari sisi tenaga kerja, akan terjadi proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan. Meski pergerseran ini tertinggal (lag) dibandingkan proses perubahan struktral itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses transformasi perubahan struktural tersebut. Jika di generalisasikan, maka negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar pada dasarnya akan menggambarkan tingkat permintaan yang tinggi. Disamping itu, akan terjadi perubahan pola produksi dengan memenuhi kebutuhan daerah dengan melakukan impor.

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi juga merupakan implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Tinjauan makro sektoral dan tinjauan keuangan adalah merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik. Ada dua macam struktur ekonomi suatu perekonomian. Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri



eneri mengatakan bahwa perubahan sturktur ekonomi, secara umum sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian in yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand impor-impor ($X - M$), Agregat supplay (AS) yang merupaka produksi dan

pengunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran Chenery pada dasarnya sama dengan teori model Lewis. Teori Chenery dikenal dengan teori pattern of development, dimana dalam teori ini difokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain : 1) Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan 2) Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi 3) Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya. 4) Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan 5) Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. 6) Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus 7) Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah 8) Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

2.2. Hubungan antar Variabel

2.2.1. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat, PMTB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan

Anyanwu and Erhijakpor (2007) menyelidiki pengaruh pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah, dengan referensi khusus di negara-negara SANE (Afrika Selatan, Aljazair, Nigeria dan Mesir). Temuan-temuan ini memperkuat pernyataan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berdampak positif terhadap partisipasi tingkat dasar dan menengah.

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan meningkatkan kesejahteraan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan (Glomm and



Ravikumar, 1997). Studi belanja pemerintah yang berfokus kepada kesejahteraan kemanusiaan adalah Gupta dan Clements (1998) dan Easterly (1999). Studi tersebut menemukan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan mempunyai dampak positif terhadap pembentukan sumber daya manusia, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan dan mengurangi kemiskinan. Namun produktifitas dan manfaat belanja pendidikan dan kesehatan bergantung pada bagaimana dana dialokasikan pada sektor-sektor tersebut.

Echekoba and Chinelo (2017) dalam penelitiannya menjelaskan jika belanja pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan sangat Signifikan, sedangkan belanja kesehatan mempunyai dampak yang positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan.

Pengeluaran publik yang efektif untuk pendidikan dan kesehatan sangat penting karena sumber daya terbatas dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menopang pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar hidup dan perkembangan manusia (Craigwell, 2012).

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Meyer and Sullivan (2002) menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kesejahteraan. Kesejahteraan dari dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Menurut Todaro dan Smith (2008), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, meningkatnya tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya i-nilai kemanusiaan, dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan aan pilihan sosial dari individu dan bangsa.



rogram sosial seperti pendidikan dan kesehatan pada umumnya diyakini pengaruh pada human development, dan dengan begitu, peningkatan

pengeluaran pemerintah terhadap program tersebut diharapkan dapat menghasilkan *social outcome* dan pertumbuhan ekonomi. Karena pembelajaran dan pelatihan tidak dapat diukur dengan mudah, kesehatan dan pendidikan menjadi ukuran dari *human capital* yang lebih umum digunakan dalam studi empiris yang menjelaskan hubungan antara *human capital* dan pertumbuhan ekonomi (Ogundari and Awokuse 2018).

Todaro and Smith (2009) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan hanya sekedar hak azasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat. Kesehatan dan pendidikan membutuhkan campur tangan dari pemerintah karena merupakan penyediaan barang publik.

Anand and Ravallion (1993) dengan sampel 86 negara berkembang menggunakan grafik harapan hidup terhadap konsumsi per kapita untuk menyelidiki korelasi antara pembangunan manusia (harapan hidup saat lahir) dan kemakmuran agregat (produk nasional bruto). Hubungan tersebut ditafsirkan dalam tiga cara. Yang pertama adalah penyediaan barang dan jasa penting seperti layanan kesehatan oleh pemerintah akan memberikan hasil sosial yang lebih baik. Pandangan kedua berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bertanggung jawab langsung; ketika pendapatan rata-rata meningkat, masyarakat dapat membeli barang dan jasa sosial yang relevan.

Berbeda dengan Anand and Ravallion (1993), penelitian Carrin and Politi (1995) yang menyatakan bahwa meskipun produk nasional bruto per kapita merupakan faktor penting yang menentukan status kesehatan, hal tersebut tidak dapat dikendalikan. Dengan menggunakan sampel 40 negara pada tahun 1985-1990 mereka mempelajari pengaruh pengentasan kemiskinan dan pengeluaran kesehatan masyarakat terhadap status kesehatan di negara-negara berkembang. Penelitian ini menggunakan estimasi regresi dengan status kesehatan yang terdiri dari angka harapan hidup, angka kematian bayi dan angka kematian balita sebagai



terikat dan rasio pengeluaran kesehatan masyarakat terhadap produk bruto, angka kemiskinan absolut total dan produk nasional bruto per kapita sebagai variabel bebas. Hasilnya menunjukkan bahwa produk nasional bruto per kapita bernilai positif dan sangat berhubungan dengan status

kesehatan, sedangkan pengentasan kemiskinan berhubungan langsung dengan kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan ternyata tidak signifikan secara statistik karena mungkin tidak efisien atau bukan merupakan ukuran yang baik dari upaya pemerintah untuk membiayai layanan kesehatan dasar.

Greenidge dan Stanford (2007), dengan menggunakan data panel dari 37 negara dari tahun 1994 hingga 2005 berusaha mengidentifikasi variabel-variabel yang secara statistik penting dalam menentukan status kesehatan di Amerika Latin dan Karibia. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan sebagai rasio terhadap PDB, ketersediaan kalori per kapita (asupan kalori) dan tingkat melek huruf serta tingkat urbanisasi menambah status kesehatan penduduk yang diukur dengan harapan hidup, sementara emisi karbon dioksida per kapita mengurangi umur panjang.

Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dua tahap pada 50 negara berkembang dan negara transisi disimpulkan oleh Gupta, *at.al* (2004) bahwa pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan memperkuat status kesehatan suatu negara. Pembuat kebijakan perlu mengalokasikan sumber daya di bidang layanan kesehatan secara bebas dan efisien untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin. Mereka menemukan bahwa layanan kesehatan juga dipengaruhi secara positif oleh pendapatan per kapita, urbanisasi, tingkat melek huruf pada orang dewasa, akses terhadap sanitasi dan air, serta pengeluaran swasta.

Swaroop (1996) menyatakan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar sangat penting di Karibia, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh peningkatan pendapatan, lapangan kerja dan perluasan produktivitas mereka yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Jamaika, kontraksi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia mungkin tidak mengakibatkan rendahnya standar hidup atau berkurangnya pertumbuhan ekonomi karena kemungkinan besar pengeluaran sektor swasta menyebabkan

tan besar dalam total kesehatan. pengeluaran seperti yang terjadi antara 30 dan 1994.

ntuk menilai hasil sosial dari pengeluaran pemerintah untuk status n, Rajkumar and Swaroop (2008) menggunakan data tahunan untuk



tahun 1990, 1997 dan 2003 dan regresi kuadrat terkecil biasa untuk 91 negara maju dan berkembang. Hasil dari studi lintas negara menunjukkan bahwa pengeluaran publik untuk kesehatan mempunyai dampak negatif yang lebih besar terhadap kematian anak di negara-negara dengan tata kelola yang baik, kualitas birokrasi yang tinggi, dan tingkat korupsi yang rendah. Pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan saja tidak menjamin peningkatan hasil sosial, perangkat tata kelola yang berkualitas seperti perumusan anggaran yang berfungsi dengan baik, pelaksanaan dan pemantauan sangat penting untuk menghasilkan posisi kesehatan yang lebih baik.

Perspektif subyektif non-ekonomi mendefinisikan kesejahteraan sebagai perasaan sehat, bebas dari sakit dan mampu mengarungi kehidupan secara positif. Kesejahteraan menggambarkan perasaan seperti kebahagiaan, kepuasan, kedamaian hati, kenyamanan, kesenangan dan kenikmatan.

2.2.2. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat, PMTB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Lainnya

Daniel Francois Meyer (2019) meneliti tentang bagaimana peningkatan perekonomian di Afrika selatan mengapa cenderung lebih cepat apabila dibandingkan dengan negara Afrika lainnya. Beliau menemukan bahwa dalam hal kebijakan makro di negara tersebut terkhusus dalam hal komponen investasi lebih menitikberatkan pada pembentukan modal tetap bruto. Hal ini juga berlaku pada peran dari tenaga kerja per sektor di Afrika Selatan terhadap peningkatan ekonomi negara tersebut.

Disamping itu Lach, Łukasz (2010) dalam penelitiannya mengambil studi kasus negara Polandia menguji tentang adanya ketergantungan kausalitas antara pembentukan modal tetap bruto dengan PDB. Hasil dari makalah ini memberikan bukti untuk mengklaim bahwa modal tetap (PMTB) di Polandia masih di bawah tingkat maksimalisasi pertumbuhannya. Meskipun partisipasi di UE merangsang kenaikan aset tetap (PMTB), krisis ekonomi telah mengubah proses ini. Rekomendasi kebijakan utama yang dihasilkan dari makalah ini adalah bahwa ah Polandia dan sektor swasta pasti harus meningkatkan tingkat investasi



2.2.3. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, PMTB dan Tata Kelola Pemerintahan

Meskipun indikator tata kelola yang lebih berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi pertumbuhan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola. Perdebatan tentang korupsi telah difokuskan pada, apakah korupsi memperlambat atau mendorong kegiatan ekonomi. Aliran pertama atau “grease the wheels of bureaucracy” menyatakan bahwa suap meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan bertindak sebagai alat untuk menghemat atau mempercepat uang. Leys tahun 1970 berpendapat bahwa pembayaran sampingan kecil kepada pengurus kantor publik dapat membantu dalam mengurangi hambatan birokrasi dan dengan demikian mendorong kegiatan ekonomi. Aliran kedua “sand the wheels of bureaucracy” menegaskan bahwa korupsi dapat berakibat fatal bagi kegiatan ekonomi karena tidak hanya membuat prosedur birokrasi menjadi lamban, mahal, dan tidak efisien tetapi juga mengalihkan sumber daya ke kegiatan yang tidak produktif. Selain itu, korupsi semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negaranegara yang memiliki institusi yang lemah seperti demokrasi, stabilitas politik dan pemerintahan (Shabbir, 2017).

Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa korupsi dapat menimpa penduduk miskin secara tidak proporsional dan menjadi penghalang utama bagi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintahan yang jujur sangat ditekankan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pendapatan yang lebih tinggi.

Penting untuk mempertimbangkan peran faktor kelembagaan. Secara khusus, analisis empiris menggabungkan dua faktor yang berkaitan dengan alokasi sumber daya publik yang efisien. Yang pertama adalah korupsi, yang didefinisikan sebagai 'penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi' (Svensson, 2005) Dimasukkannya korupsi dalam analisis regresi dapat dibenarkan dengan mengacu pada bukti adanya distorsi yang disebabkan oleh korupsi dalam alokasi dana publik (Mauro, 1998).



litas institusi (tingkat korupsi dan desentralisasi belanja) rata-rata yai dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mengingat pemerintahan di UE saat ini (Hessami, 2010),

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu, termasuk bekerja, suara politik dan tata kelola pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) dan ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisisk. Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Pemerintahan yang baik merupakan elemen utama untuk pembangunan yang sejahtera di negara manapun, yang artinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik, keberadaan good governance sangat penting terutama di negara berkembang (Turner, 2011). Ahmad dan Saleem (2014), menemukan bahwa tata kelola berpengaruh signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa karya empiris yang lain juga telah menunjukkan adanya hubungan antara tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi (Awan *et al.*, 2018; Oyinlola *et al.* 2020; dan Bah dan Kpognon, 2020) maupun pembangunan manusia (Ahmad dan Saleem 2014; Keser and Gökmen, 2017; dan Chaudhry,*at.al.*, 2009).

Variabel stabilitas politik, efektivitas pemerintah, dan pengendalian korupsi memberikan hasil yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk semakin meningkatkan efektivitasnya, memiliki lingkungan politik yang stabil, serta terhindar dari praktik korupsi yang dapat menghambat pembangunan. Selain itu, korupsi dapat menimpa penduduk miskin secara tidak proporsional dan menjadi penghalang utama bagi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan (Todaro and Smith, 2006). Jika pemerintah terus berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bukan hal yang mustahil untuk mencapai suatu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga diharuskan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirumuskan



terjalan sesuai dengan rencana, karena efektivitas pemerintah inilah yang mendorong naiknya indeks pembangunan manusia.

Tata kelola pemerintahan yang diterapkan dengan tidak baik menyebabkan ketidakobjektifnya keputusan yang diambil, baik terkait biaya, sumber daya ataupun

alokasi anggaran. Hal ini tentu saja akan mengganggu perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, isu tata kelola pemerintahan menjadi masalah krusial yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan berbagai langkah anti korupsi (Nyamori, Rahaman, dan Samkin, 2017).

2.2.4. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, PMTB dan Struktur Ekonomi

Dari hasil penelitian Ramirez dkk (1998) dengan data cross-country (1970-1992), menemukan adanya hubungan positif yang kuat antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sedangkan tingkat investasi dan distribusi pendapatan adalah penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi terdiri dari perubahan yang terjadi dalam komposisi output serta serapan tenaga kerja dalam struktur ekonomi yang berimplikasi pada distribusi pendapatan (Kuznets and Murphy, 1966). Perbedaan struktur ekonomi yang ada di setiap wilayah merupakan hasil dari pola perubahan structural (Alisjahbana, 2020). Karena pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tidak mempunyai kecepatan yang sama, maka pengaruh perubahan struktur ekonomi berdampak pada ketimpangan pendapatan

2.3. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris dalam penelitian ini adalah rujukan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, digunakan oleh peneliti sebagai pembanding dalam membuat kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian ini.

Febriarta and Sutrisna (2020) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota/Kabupaten Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah infrastruktur dan pendidikan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah kesehatan tidak berpengaruh terhadap perubahan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja pemerintah



infrastruktur dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja pemerintah pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memediasi efek pengeluaran pemerintah infrastruktur dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh belanja pemerintah kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Nasution melakukan studi tentang Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam (2007). Studi ini menggunakan indikator-indikator sebagai ukuran variabel, yaitu variabel Kemampuan Pemerintah diukur dengan indikator PAD dan Belanja Modal, variabel Perkembangan Ekonomi diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Tingkat Daya Beli/Pendapatan, dan Angka Kriminalitas. Model analisis data adalah Partial Least Square (PLS) karena model analisisnya berjenjang dan model persamaan structural memenuhi model rekursif, variabelnya laten, dan sample size tidak memenuhi untuk menggunakan Structural Equation Model berbasis kovarian.

Kesimpulan hasil studi Nasution adalah kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan p-value = 0,00, artinya apabila tingkat kemampuan pemerintah meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan p-value = 0,00, artinya apabila perkembangan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; dan kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan ekonomi dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,0997 dengan p-value = 0,0001, artinya apabila



kemampuan pemerintah meningkat maka perkembangan ekonomi Kota Batam meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam dengan peningkatan pada Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Daya Beli/Pendapatan, dan penurunan pada Angka Kriminalitas.

Badrudin meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2011). Studi tersebut dilakukan menggunakan data tahun 2001 s.d 2008 dengan populasi semua kabupaten/kota, menggunakan model analisis regresi dengan pooled data gabungan antara time series dan cross section. Kesimpulan hasil studi Badrudin adalah belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung studi Remy (1994), Adi (2005b), Suryanto (2005), serta Suhendra dan Amir (2006). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

PDB per kapita merupakan ukuran paling populer terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi identik dengan peningkatan secara berkelanjutan dalam produk per kapita (Galindo, 2009). Pertumbuhan PDB per kapita dianggap memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan lainnya yang mempunyai dampak positif pada kesejahteraan individu.

Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional merupakan teori berdasarkan pada asumsi antara lain perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung adalah konstan, proses produksi memiliki koefisien yang tetap, tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan. Menurut teori ini, pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja dapat bergerak searah secara seimbang, akan tetapi dapat juga pincang diakibatkan daerah yang pertumbuhannya tinggi akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah sehingga yang maju semakin maju dan yang terbelakang semakin ketinggalan.

Kesejahteraan ekonomi adalah tingkat di mana individu dan keluarga memiliki kecukupan ekonomi (McGregor dan Goldsmith, 1998). Kesejahteraan masyarakat dikatakan meningkat apabila pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita riil terus bertambah dari tahun ke tahun (Sukirno, kualitas institusi yang baik, yang mencakup baiknya kualitas tata kelola an, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui alokasi an pembangunan yang tepat sasaran. Barro (1990) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dengan optimasi pengeluaran pemerintah



Menurut Hart dan Schulze (2016) Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit pada pertengahan 2016 namun masih berada di bawah angka yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi.

Easterlin dalam risetnya 1974, telah menunjukkan kenaikan *gross domestic product* (GDP) tidak berkorelasi kuat dengan kebahagiaan. Situasi demikian, terjadi karena beberapa kemungkinan penyebab, di antaranya karena kenaikan GDP perkapita berkorelasi negatif terhadap lingkungan, kesehatan, pemerataan, dan lainnya (Rafael DI Tella and Robert MacCulloch, 2006). Intinya, tidak cukup memadai memandang kemiskinan hanya dari variabel pendapatan.

Seligson dan Kuznets (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk dapat menyediakan semakin banyak barang dan jasa kepada penduduknya sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Hasil studi tentang pertumbuhan ekonomi antar negara yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin, terlihat bahwa pada masa transisi ada beberapa faktor keseragaman atau faktor universal pada pola pertumbuhan ekonomi dari negaranegara yang diteliti, yaitu pertama, kebutuhan akan modal fisik dan modal manusia; kedua, perubahan yang sama dalam permintaan konsumen dalam permintaan akibat meningkatnya pendapatan; ketiga, akses dari semua negara teknologi yang sama; keempat, akses terhadap perdagangan internasional atau luar daerah; dan kelima, peningkatan spesialisasi.

Daniel Francois Meyer (2019) meneliti tentang bagaimana peningkatan perekonomian di Afrika selatan mengapa cenderung lebih cepat apabila dibandingkan dengan negara Afrika lainnya. Beliau menemukan bahwa dalam hal kebijakan makro dinegara tersebut terkhusus dalam hal komponen investasi lebih



eratkan pada pembentukan modal tetap bruto. Hal ini juga berlaku pada ri tenaga kerja per sektor di Afrika Selatan terhadap peningkatan ekonomi tersebut.

Lukasz (2010) dalam penelitiannya mengambil studi kasus negara Polandia menguji tentang adanya ketergantungan kausalitas antara pembentukan modal tetap bruto dengan PDB. Hasil dari makalah ini memberikan bukti untuk mengklaim bahwa modal tetap (PMTB) di Polandia masih di bawah tingkat maksimalisasi pertumbuhannya.

Penelitian Zadjuli (1986) Dengan pendekatan makro serta teori yang berhubungan dengan disparitas pertumbuhan antar sektor, dapat diketahui sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada dekade 1975- 1981, sektor industri di Provinsi Jawa Timur merupakan sektor yang menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap industri secara nasional. Pada tahun 1975, disebutkan bahwa industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur lebih bersifat padat modal dan konsentrasi kegiatan industri lebih banyak mempertimbangkan bahan baku dan nilai tambah. Kemudian pada tahun 1980, industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur telah berubah menjadi padat tenaga kerja dan disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur yang meloncat, tidak berurutan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Studi ini juga menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur, selama dekade 1969 s.d 1975 dan 1975 s.d 1981 mengalami tingkat pertumbuhan tinggi (high Growth), dengan peranan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 1969 sebesar 33,12 persen; tahun 1975 sebesar 55,86 persen dan tahun 1981 sebesar 62,84 persen.

Penelitian terkait belanja pemerintah berfokus kepada kesejahteraan kemanusiaan dilakukan oleh Gupta, Clements dan Tiongson (1998) dan Easterly (1999). Penelitian tersebut memprediksi hubungan positif antara belanja pemerintah dengan *outcomes* kemanusiaan di bidang kesehatan dan pendidikan, indeks mutu hidup fisik (IMHF), dan angka kematian.

Semua belanja pemerintah untuk penguatan human capital seharusnya mendorong pemanfaatan sumber daya alam (SDA), social capital, infrastruktur, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga penelitian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia



belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Shen, et.al 2021)

Penelitian Gomanee, et.al (2005) menemukan hubungan yang positif antara belanja pemerintah dengan IMHF, IPM, angka partisipasi murni pendidikan

dasar (APM), angka kematian balita (AKBA), dan angka kematian ibu (AKI). Akan tetapi, Yaqub et al, (2012) menemukan hubungan yang negatif antara belanja pemerintah dengan AKBA dan harapan usia hidup, sedangkan studi dari Rajkumar dan Swaroop (2008) menemukan hasil yang mendua tentang hal tersebut. Hubungan positif antara belanja pemerintah dengan tingkat kesejahteraan rakyat masih menyisakan pertanyaan yang sampai sekarang belum terpecahkan secara teoritis maupun secara empiris. Studi empiris tentang topik tersebut pada konteks yang berbeda di negara berkembang masih sangat diperlukan. Studi empirik tentang topik tersebut pada level daerah di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sangat kurang.

Alam, at.al., (2010), Barrientos dan Scott (2008) seluruhnya menemukan hubungan yang positif antara belanja pemerintah dengan PDB per kapita. Ogbonnaya (2017) menemukan bahwa dalam rentang waktu satu dan dua tahun pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh negatif signifikan yang lemah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nigeria. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap IPM selama rentang waktu 2 tahun.

Penelitian Christopher and De (2020) dengan judul "*Government Expenditure on Human Capital and Growth in Namibia: a time series analysis*" melihat dampak pengeluaran pemerintah pada modal manusia pada indikator pembangunan manusia seperti hasil perawatan kesehatan, pencapaian pendidikan dan peningkatan pendapatan nasional di Namibia menggunakan data deret waktu dari 1980 hingga 2015. Analisis menunjukkan menjalankan hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dengan angka kesuburan, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Namun, tidak ada kointegrasi yang diamati antara pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan dan harapan hidup atau angka kematian orang dewasa. Selain itu, temuan ini mengungkapkan hubungan positif jangka panjang yang signifikan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan tingkat melek huruf, angka partisipasi murni pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Sedangkan, tidak



egrasi antara belanja pemerintah untuk pendidikan dan angka partisipasi tingkat dasar dan menengah. Analisis regresi otomatis vektor menangkap dampak signifikan dari pengeluaran pada perawatan kesehatan pendidikan terhadap pertumbuhan PDB dalam jangka panjang melalui

peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian, hasilnya mendukung kelanjutan kebijakan pengeluaran pemerintah yang ekspansif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Namibia.

Menurut penelitian Sasana (2012) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan alokasi belanja langsung yang tepat maka pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Rashida and Nabeela (2009) meneliti tentang dampak belanja pemerintah di berbagai sektor ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan menggunakan data tahunan seri waktu untuk periode 1972 sampai 2008, untuk menganalisis dampak jangka panjang dari pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan layanan masyarakat, defisit anggaran dan undang-undang dan ketertiban pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pengembangan ekonometrik baru-baru ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan dan hukum dan ketertiban berkontribusi secara signifikan pengurangan kemiskinan sementara belanja pemerintah untuk defisit anggaran dan layanan ekonomi dan masyarakat tampaknya bertanggung jawab atas kemiskinan di Pakistan.

Edeme (2014) menganalisis dampak pengeluaran sektoral terhadap pembangunan manusia di Nigeria dengan menggunakan data dari 20 negara bagian untuk periode 1999-2012. Data masing-masing negara dihasilkan dari berbagai isu Laporan Akuntan-Jenderal, Laporan Tahunan Bank Sentral Nigeria dan Laporan Akun dan Laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa. Untuk ketahanan analisis, pengeluaran total, berulang dan belanja modal



pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, dan, perlindungan lingkungan dan sumber air portabel digunakan sebagai pembangunan manusia. Hasilnya menggambarkan bahwa ada pengaruh fungsional positif antara pendidikan, kesehatan, pertanian,

pembangunan pedesaan, energi, perumahan, perlindungan lingkungan dan pengeluaran sumber daya air portabel dan pembangunan manusia. Sebuah indikasi bahwa pengeluaran untuk sektor-sektor ini mendorong perkembangan manusia.

Guisan and Exposito (2010) menganalisis hubungan antara pengeluaran kesehatan, pendidikan dan beberapa indikator kesejahteraan manusia di Afrika dan Asia. Tujuannya adalah untuk menyarankan beberapa prioritas langkah yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan kebijakan dalam negeri berhasil untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan dan kualitas hidup sesuai dengan tujuan pembangunan.

Belanja pemerintah dapat ditinjau berdasarkan pendapat para ahli, menurut Teori Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tiga tahapan pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, menengah, dan lanjut. Ketika memasuki tahap awal perkembangan ekonomi, rasio belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional cukup besar (Dumairy, 1997). Lebih lanjut dikemukakan bahwa, ketika berada pada tahap menengah pembangunan ekonomi, tetap diperlukan investasi pemerintah untuk merangsang pertumbuhan agar dapat lepas landas. Akan tetapi, peranan investasi swasta sudah semakin tinggi, disamping itu peranan investasi pemerintah tetap tinggi. Tahap lanjut pembangunan, merupakan peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke belanja layanan sosial, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Selanjutnya, teori Adolf Wagner mengukur perbandingan belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melalui teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1996). Wagner berpendapat, dalam apabila PDB naik maka secara otomatis belanja pemerintah pun akan naik. Kemudian Teori Peacock Wiseman yang dilandasi oleh masyarakat yang mempunyai suatu tingkat toleransi besarnya pajak, di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.



Penelitian Ichvani and Sasana (2019) menyatakan bahwa korupsi dan defisit ekonomi memiliki hubungan yang signifikan, semakin bersih suatu negara dari korupsi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dalam hal ini korupsi merupakan pengganggu dalam perekonomian.

Kenaikan indeks persepsi korupsi sebesar 1 poin dapat mengakibatkan PDB per kapita negara-negara Asia tumbuh 0,52 persen, dengan asumsi variabel independen lain konstan. Dengan demikian, semakin tinggi indeks persepsi korupsi, kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia semakin meningkat, atau dengan kata lain semakin bersih suatu negara dari korupsi, masyarakatnya akan semakin sejahtera secara ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung pandangan *sand the wheels' hypothesis*. Selain itu, korupsi yang seringkali terjadi di kalangan pejabat adalah berkolusi dengan pemungut pajak untuk mengecilkan kewajiban pajak (Aidt, 2003). Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. Padahal, pajak berguna untuk mendanai aktivitas pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya preventif maupun represif dalam menghadapi korupsi di negara-negara Asia. Upaya preventif bisa dilakukan dengan pendidikan antikorupsi sejak dini, sedangkan upaya represif bisa dilakukan dengan memperkuat dan mendukung organisasi antikorupsi dalam menjalankan tugasnya.

Pradipto (2016) menyatakan bahwa korupsi yang tinggi dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian (*Sand the Wheels Hypothesis*) atau berpengaruh positif terhadap perekonomian (*Grease the Wheels Hypothesis*). Tingkat korupsi pada sebuah negara dapat dicerminkan oleh indeks persepsi korupsi (IPK) yang berada dalam rentang 0-100, di mana semakin tinggi nilai indeks, maka tingkat korupsi di suatu negara semakin kecil. Pada tahun 2016, sebanyak 75 persen negara di Asia mempunyai indeks persepsi korupsi di bawah 50, artinya tingkat korupsi di sebagian besar negara Asia bisa dikatakan cukup tinggi, terutama di negara berkembang Asia bagian tengah dan barat.

Penelitian Follmi, at.al., (2002) yang berjudul *Structural Change and The Kaldor Fact of Economic Growth. University of Zurich*. Dalam jangka panjang terdapat perubahan mengenai struktur produksi dan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi model Kaldor. Perubahan struktural sesuai dengan realokasi dari tenaga kerja yang disebabkan perbedaan elastisitas pendapatan antar sektor dan interaksi sektoral; selanjutnya pertumbuhan ekonomi memberikan



hadap tumbuhnya industri baru, demikian pula halnya dengan riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas.

Penelitian yang dilakukan Rozenov (2005) dengan judul *Input-Output Analysis of The Analysis of Structural Change : The Case of Bulgaria. Center for*

Economic Reform and Transformation menganalisis berdasarkan penggunaan tabel input-output mengungkapkan berbagai aspek kegiatan ekonomi dalam keterkaitannya. Seiring perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, struktur output berubah, yang mencerminkan perubahan pola permintaan dan kemajuan teknologi. Pergeseran dalam produksi pada gilirannya mempengaruhi pekerjaan dan upah dan karena itu memiliki implikasi penting bagi kebijakan ekonomi. Penilaian dampak perubahan struktural terhadap pembangunan ekonomi sangat relevan dengan kasus Bulgaria karena negara tersebut baru saja keluar dari resesi yang dalam, dikombinasikan dengan inflasi yang tinggi dan volatilitas suku bunga.

Penelitian yang dilakukan Zagler (2009) dengan judul *Economic Growth, Structural Change and Search Unemployment* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dan kontribusi yang tetap dari pekerja, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara orang yang bekerja pada sektor jasa.

Chenery dan Syrquin, melakukan penelitian terhadap 101 negara sebagai sampel yang masing-masing memiliki penduduk lebih dari satu juta jiwa, meliputi jangka waktu 1950-1970. Penelitiannya berhasil mengidentifikasi 21 indikator perubahan struktural melalui tiga proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi, yaitu proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi. Akumulasi diartikan sebagai proses pembinaan sumber-sumber daya produksi yang meningkatkan kemampuan berproduksi dalam tata susunan ekonomi masyarakat. Alokasi menyangkut pola penggunaan sumber-sumber daya produksi yang dapat membawa pada perubahan struktur produksi (peranan dan kontribusi sektoral dalam produk nasional), pada komposisi sektoral di dalam permintaan domestik, dan pada lalulintas perdagangan dan pembayaran luar negeri.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu atau studi empirik yang telah dikemukakan, maka relevansi dengan studi ini adalah menggunakan beberapa variabel antara lain kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan, belanja untuk perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan dan struktur ekonomi menjadi dasar dalam memberikan penjelasan dan sebagai temuan hasil sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar dalam pengambilan kebijakan.

